

INDONESIA 2045 DI DEPAN MATA

Hendra Gunawan

Seperti apakah sosok Indonesia pada tahun 2045, saat berusia 100 tahun? Dalam ceramahnya, Gita Wirjawan (<http://www.youtube.com/watch?v=6PTuPnKTeSQ>), mengungkapkan bahwa, pada milenium pertama, para leluhur kita bisa membangun candi Borobudur yang merupakan candi terbesar di dunia; dan pada milenium kedua, Kerajaan Majapahit merupakan pelaku penting dalam percaturan dunia. Memasuki milenium ketiga, apa yang bisa diperbuat oleh Indonesia?

Apakah Indonesia akan dilirik oleh negara-negara lain hanya sebagai negara yang kaya sumber daya alamnya untuk dieksploitasi, atau sebagai negara berpenduduk banyak dan merupakan pasar potensial bagi produk-produk mereka?

Dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang disusun oleh Menko Perekonomian, dicanangkan bahwa pada tahun 2025 Indonesia akan menjadi negara yang mandiri, maju, adil dan makmur, dengan pendapatan per kapita sekitar USD 15.000. Saat itu, Indonesia diharapkan akan menjadi kekuatan ekonomi 12 besar dunia. Lebih jauh, pada tahun 2045 Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu dari 7 kekuatan ekonomi di dunia, dengan pendapatan per kapita mencapai USD 47.000!

Namun, yang dimaksud dengan negara “maju” dalam dokumen MP3EI adalah negara yang pertumbuhan ekonominya positif dan tingkat inflasinya menurun. Apakah masyarakat dan kehidupannya juga maju atau beradab, tidak disinggung sama sekali.

Salah satu argumen yang dipakai dalam perumusan MP3EI itu adalah statistik penduduk kita. Konon, pada periode 2015-2045, piramida penduduk Indonesia akan

sangat ideal, dengan penduduk mayoritas berusia 25-45 tahun, usia produktif. Indonesia, saat itu, akan menikmati apa yang disebut dengan "bonus demografi" (*demographic window*). Masalahnya adalah, seperti apa kualitas mereka, penduduk usia produktif itu, kelak?

Sebagai ilustrasi, memasuki AFTA 2016, para insinyur perlu mengantongi sertifikasi untuk dapat melaksanakan tugas keinsinyurannya di wilayah Asia. Berapa banyakkah insinyur kita yang telah tersertifikasi saat ini? Tak lebih dari 100 orang! Sementara, pada saat yang sama, jumlah insinyur Singapura yang telah tersertifikasi mencapai ribuan. Dalam situasi seperti ini, para "insinyur" kita hanya akan menjadi operator atau asisten insinyur asing yang kelak beroperasi di Indonesia. Jadi, bila demikian, pembangunan oleh siapa dan untuk siapa?

Kita tentunya tidak ingin menjadi pembantu di rumah sendiri. Namun, bila kita melihat banyak kasus yang terjadi sekarang ini di negara kita (kasus perpajakan, politik uang, permainan APBN, dan lain-lain), dan para pelakunya ternyata masih berusia 30-45 tahun, kita bertanya: dapatkah kita mengelola negara sendiri?

Kita juga menyaksikan masyarakat kita yang suka menerabas, tidak peduli lingkungan, bekerja asal-asalan, berpikir jangka pendek, dan seterusnya. Pendidikan macam apa *sih* yang mereka dapatkan sebelumnya? Singkat kata, di era kehidupan modern ini, intelektualitas dan budaya masyarakat kita masih terbelakang.

Bila kita ingin menjadi negara yang maju dan beradab, banyak pekerjaan rumah yang perlu kita garap, terutama mencerdaskan kehidupan bangsa --- yang hingga saat ini belum terwujud! Kuncinya adalah pendidikan, pendidikan, dan pendidikan! Bila kita tidak menggarapnya dengan baik, kita akan tenggelam --- bukan sekadar tertinggal!

Di harian *Kompas*, 20 Januari 2013, Jusuf Kalla, di hadapan Forum Rektor, menyatakan bahwa "Indonesia bangsa yang besar dan memiliki kekayaan luar biasa. Bangsa

ini lambat kemajuannya bukan karena sistemnya. Negara boleh berbeda atau sama sistemnya, tetapi yang paling penting (adalah) soal kepemimpinan. Ketika pemimpin bangsa ini bertekad memerangi korupsi, mestinya dia menjadi teladan. Memberikan sumbangan atau melahirkan pemimpin yang memiliki teladan itulah tugas perguruan tinggi supaya Indonesia menjadi bangsa yang besar.”

Teringat ketika mahasiswa, senior saya mengatakan “*A leader is one who knows the way, shows the way, and goes the way.*” Pertanyaannya, dari mana pemimpin seperti itu kita dapatkan? Sepakat dengan Jusuf Kalla, pemimpin panutan mestinya dibesarkan, bila tidak dilahirkan, di perguruan tinggi. Jadi, perguruan tinggi memainkan peran penting bagi bangsa untuk mendidik calon pemimpin bangsa, dari Presiden hingga kepala rumah tangga.

Kontribusi perguruan tinggi yang dominan selama ini memang adalah para alumni yang menggerakkan bangsa ini, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik. Namun, kualitas dan kiprah mereka belum memadai untuk menjadikan Indonesia bangsa yang maju dan beradab.

Saat ini terdapat 3.200 lebih perguruan tinggi di Indonesia, namun tak lebih dari 20 perguruan tinggi saja yang berkualitas. Bahkan, 20 perguruan tinggi terbaik kita pun masih tertinggal dari sejumlah perguruan tinggi di negeri tetangga, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi saat ini dan ke depan.

Bila demikian halnya, bagaimanakah Indonesia bisa tetap eksis dan bersaing di masa mendatang? Di era pengetahuan dewasa ini, hanya bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki budaya yang tangguh lah yang dapat bersaing dan menjadi bangsa besar, dengan peradaban yang maju.

Indonesia 2045 masih 32 tahun lagi, *so what*, anda mungkin berpikir begitu. Saat itu, sebagian dari kita --- khususnya yang telah berusia separuh baya --- bahkan

mungkin sudah tiada. Namun, sesungguhnya, Indonesia 2045 ada di depan mata kita sekarang! Anak-anak berusia balita hingga remaja tersebar di sekitar kita. Ada yang sedang belajar, ada yang asyik bermain, ada pula yang mengamen di perempatan jalan. Merekalah yang merupakan bonus demografi itu dan akan memimpin bangsa ini kelak!

Indonesia 2045 ada di depan mata, jangan disia-siakan! Pendidikan di sekolah, di rumah dan di luar rumah, akan sangat menentukan. Peran kita semua diperlukan untuk mendidik dan mengarahkan mereka, guna mewujudkan Indonesia 2045 yang kita idamkan. Nasib Indonesia pada milenium ketiga ditentukan oleh anak-anak kita, dan kita semua turut bertanggung-jawab menyiapkannya!

Bandung, 28 Februari 2013